

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Deskriptif

5.1.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Perempuan di Kabupaten/Kota di provinsi Jambi

Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja perempuan adalah perempuan yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan pendapatan baik yang sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi setiap tahun semakin bertambah. Hal ini mengakibatkan tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak agar jumlah pengangguran tidak bertambah. Adapun besaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2019- 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020		2021		2022		2023	
1	Kerinci	50,00	56,48	6,48	58,06	1,58	61,42	3,36	60,88	-0,54
2	Merangin	51,25	51,96	0,71	52,06	0,10	50,98	-1,08	51,52	0,54
3	Sarolangun	44,75	51,14	6,39	46,33	-4,81	47,77	1,44	47,14	-0,63
4	Batang Hari	38,07	47,82	9,75	51,68	3,86	42,44	-9,24	38,16	-4,28
5	Muaro Jambi	34,29	37,41	3,12	40,77	3,36	45,55	4,78	58,79	13,24
6	Tanjung Jabung Timur	50,91	60,48	9,57	55,40	-5,08	54,50	-0,90	47,21	-7,29
7	Tanjung Jabung Barat	53,20	59,46	6,26	59,00	-0,46	50,86	-8,14	51,06	0,20
8	Tebo	51,77	52,55	0,78	52,63	0,08	49,14	-3,49	50,28	1,14
9	Bungo	44,69	45,12	0,43	44,06	-1,06	48,87	4,81	53,52	4,65
10	Kota Jambi	50,72	48,49	-2,23	47,68	-0,81	45,88	-1,80	51,57	5,69
11	Kota Sungai Penuh	50,37	50,93	0,56	52,29	1,36	47,11	-5,18	53,69	6,58
12	Provinsi Jambi	47,27	51,08	3,81	50,91	-0,17	49,50	-1,41	51,26	1,76

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel 5.1 mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Kabupaten/Kota Provinsi selama tahun 2019 sampai tahun 2023 dimana setiap tahunnya TPAK Perempuan cenderung mengalami fluktuasi. Rata-rata TPAK di Provinsi Jambi sebesar 51.26%. Adapun rata-rata TPAK tertinggi

terjadi pada Kabupaten Kerinci sebesar 61.68% hal ini karena kegiatan ekonomi akan lebih banyak di dominasi oleh penduduk usia kerja yang lebih inovatif dan kreatif dan rata-rata TPAK terendah terjadi pada Kabupaten Batang Hari sebesar 46.79 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tertinggi terjadi pada Kabupaten Muaro Jambi sebesar 11,77 persen, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan TPAK Perempuan di Tanjung Jabung Timur. Tingginya TPAK Perempuan di Kabupaten Muaro Jambi karena kegiatan ekonomi akan lebih banyak di dominasi oleh penduduk usia kerja yang lebih inovatif dan kreatif Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan terendah terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar -0.92 persen. Rendahnya TPAK Perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebabkan oleh anggapan masyarakatnya dimana dalam anggapan tersebut laki-laki yang bertanggung jawab penuh dalam mencari nafkah untuk keluarga. Sehingga perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini banyak golongan bukan angkatan kerja seperti mengurus rumah tangga, sekolah, dan kegiatan lainnya sehingga menyebabkan TPAK yang rendah.

5.1.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Pada saat ini usaha yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat supaya terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan pembangunan nasional diseluruh aspek kehidupan, baik material maupun spiritual. Adapun besaran Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode Tahun 2019-2023 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	RATA RATA
1	Kerinci	70,95	71,21	71,45	71,99	72,54	71,63
2	Merangin	69,07	69,19	69,53	69,98	70,81	69,72
3	Sarolangun	69,72	69,89	70,25	70,89	71,29	70,41
4	Batang Hari	69,67	69,84	70,11	70,51	71,02	70,23
5	Muaro Jambi	69,01	69,18	69,55	70,18	71,04	69,79
6	Tanjung Jabung Timur	63,92	64,43	64,91	65,77	66,65	65,14
7	Tanjung Jabung Barat	67,54	67,54	68,16	68,79	69,35	68,28
8	Tebo	69,02	69,14	69,35	69,78	70,63	69,58
9	Bungo	69,86	69,92	70,15	70,55	71,06	70,31
10	Kota Jambi	78,26	78,37	79,12	79,58	80,15	79,10
11	Kota Sungai Penuh	75,36	75,42	75,7	76,17	76,65	75,86
12	Provinsi Jambi	71,26	71,29	71,63	72,14	72,77	71,82

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2024 (Diolah)

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa perkembangan pembangunan manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara representative dan terukur. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama tahun 2019-2023 mengalami perkembangan yang berfluktuatif cenderung naik turun. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi sebesar 71.82 persen pada tahun 2023. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi tercatat di Kota Jambi yaitu sebesar 79.10 persen, angka tersebut lebih besar dibandingkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Jambi cukup serius untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Itu terbukti dari kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam bidang ekonomi agar meningkatnya kualitas. Sedangkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah tercatat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 65,71 persen, artinya penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tingkat kesadaran masyarakatnya yang rendah, sarana pendidikan yang tidak seimbang dengan jumlah anak usia sekolah, dan pendapatan penduduk perkapitanya yang rendah sehingga menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jambi.

5.1.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada saat itu. Berikut ini dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Tabel. 5.3 Perkembang Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kerinci	4.23	3.81	3.89	4.43	5.73
2	Merangin	4.25	0.78	5.24	5.72	5.28
3	Sarolangun	4.25	-0.25	6.61	6.73	4.02
4	Batang Hari	5.07	-0.43	4.85	12.27	3.7
5	Muaro Jambi	4.79	0.35	3.96	8.05	6.28
6	Tanjung Jabung Timur	4.21	-3.44	0.14	0.57	2.17
7	Tanjung Jabung Barat	5.01	-0.29	1.36	2.56	3.51
8	Tebo	4.76	-0.03	4.29	6.29	4.5
9	Bungo	4.19	-0.48	4.99	4.73	4.66
10	Kota Jambi	4.73	-4.24	4.13	5.38	6.61
11	Kota Sungai Penuh	5.01	-0.16	3.67	4.44	4.92
12	Provinsi Jambi	4.59	-0.4	3.92	5.56	4.66

Sumber : BPS Provinsi Jambi,2024 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami perkembangan berfluktuatif. Untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi tertinggi tercatat pada Kabupaten Batang Hari yaitu sebesar 6.53 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah tercatat pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 0.002 persen.

Rata-rata perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di

Provinsi Jambi periode tahun 2019 sampai tahun 2023 dimana seluruh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Rata-rata perkembangan pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat pada Kota Jambi yaitu 0.47 persen. Rata-rata perkembangan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi yaitu sebesar 0.02 persen. Sementara untuk perkembangan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah tercatat pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu -0.51 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur biasanya disebabkan oleh kondisi perekonomian yang mengalami tekanan akibat krisis menghadapi perekonomian pada kabupaten tersebut.

5.1.4 Perkembangan Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah ukuran rata-rata uang yang dikeluarkan oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode tertentu. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, daya beli, dan pola konsumsi. Dalam konteks perkembangan ekonomi, pengeluaran per kapita mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, maupun kebutuhan sekunder seperti pendidikan dan hiburan.

Tabel 5.4 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2019-2023 (Rupiah) / bulan

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Perkembangan rata-rata %
1	Kerinci	849.833	832.917 - 1,99	848.667 1,89	880.833 3,79	913.750 3,74	1,86
2	Merangin	859.333	856.583 - 0,32	865.000 0,98	892.833 3,22	914.083 2,38	1,57
3	Sarolangun	973.250	968.000 - 0,54	982.667 1,52	1.005.750 2,35	1.032.667 2,68	1,50
4	Batang Hari	836.500	818.750 - 2,12	836.000 2,11	847.750 1,41	877.333 3,49	1,22
5	Muaro Jambi	724.750	713.000 - 1,62	735.417 3,14	759.833 3,32	793.750 4,46	2,33
6	Tanjung Jabung Timur	766.000	752.167 - 1,81	763.583 1,52	791.917 3,71	824.833 4,16	1,89
7	Tanjung Jabung Barat	794.917	790.000 - 0,62	808.250 2,31	830.667 2,77	852.417 2,62	1,77
8	Tebo	879.583	865.750 - 1,57	878.833 1,51	893.750 1,70	907.833 1,58	0,80
9	Bungo	971.833	955.917 - 1,64	972.500 1,73	996.333 2,45	1.018.667 2,24	1,20
10	Kota Jambi	1.017.083	1.004.667 - 1,22	1.020.000 1,53	1.049.750 2,92	1.065.250 1,48	1,17
11	Kota Sungai Penuh	875.833	854.000 - 2,49	871.167 2,01	895.417 2,78	918.917 2,62	1,23
12	Provinsi Jambi	868.083	855.614 - 1,44	871.098 1,81	894.985 2,74	919.955 2,79	1,48

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas pengeluaran perkapita Masyarakat di Kabupaten / Kota Provinsi Jambi memiliki pertumbuhan selama periode 2019-2020 adalah sebesar 1.48% dimana pengeluaran perkapita Provinsi Jambi pada tahun 2019 adalah sebesar 868.080 rupiah dan mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 882.580 rupiah. Pengeluaran perkapita terbesar berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah Kota Jambi yang memiliki Pengeluaran Perkapita pada tahun 2019 sebesar 1.017 ribu rupiah dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.065.000 rupiah. Kemudian pengeluaran perkapita Masyarakat terkecil yaitu Kabupaten Muaro Jambi yaitu pada tahun 2019 sebesar 724.750 rupiah dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 793.750 rupiah

5.1.5 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan

Katimpangan pendapatan merupakan ketidakmerataan pendapatan di seluruh kalangan masyarakat baik itu dalam bentuk kepemilikan masyarakat secara individu maupun kepemilikan dalam bentuk faktor-faktor produksi. Adapun jumlah ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.5 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2019-2023 (0-1)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kerinci	0.29	0.28	0.28	0.28	0.30
2	Merangin	0.31	0.32	0.29	0.35	0.36
3	Sarolangun	0.27	0.31	0.32	0.30	0.38
4	Batang Hari	0.31	0.32	0.31	0.29	0.36
5	Muaro Jambi	0.29	0.28	0.32	0.27	0.34
6	Tanjung Jabung Timur	0.29	0.25	0.25	0.27	0.31
7	Tanjung Jabung Barat	0.28	0.28	0.25	0.26	0.32
8	Tebo	0.26	0.30	0.30	0.30	0.24
9	Bungo	0.33	0.31	0.3	0.32	0.28
10	Kota Jambi	0.34	0.34	0.35	0.36	0.37
11	Kota Sungai Penuh	0.33	0.31	0.31	0.29	0.31
12	Provinsi Jambi	0.33	0.35	0.346	0.33	0.32

Sumber : BPS Provinsi Jambi,2024 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2019 sampai tahun 2023 cenderung mengalami tren naik

turun pada setiap tahunnya. Untuk rata-rata gini ratio tertinggi tercatat pada Kota Jambi yaitu sebesar 0,35 persen. Tingginya gini ratio di Kota Jambi itu disebabkan karena rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan pdrb perkapita di Kota Jambi yang menyebabkan kesejahteraan antar masyarakat semakin rendah dan juga pembangunan pun akan terhambat yang kemudian akan menyebabkan ketimpangan pendapatan di Kota Jambi semakin tinggi. Sedangkan rata-rata Gini Ratio terendah tercatat pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 0,27 persen. Rendahnya gini ratio di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebabkan karena tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja dan pdrb perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi dan juga pembangunan pun tidak terhambat yang menjadikan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini semakin menjadi rendah.

5.2 Analisa Regresi

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan di Provinsi Jambi yang menggunakan perhitungan regresi data panel yaitu menggunakan data time series adalah data tahunan t yaitu tahun 2019-2023 dan cross section adalah objek data yaitu meliputi 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Variabel bebas yang digunakan yaitu Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan Dan variabel terikatnya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.

5.2.1 Uji Chow

Untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel, maka akan dilakukan pengujian pemilihan model dengan menggunakan *Chow Test*, *Hausman Test* dan *Uji Lagrange Multiplier*. Metode penentuan model dengan menggunakan *Chow Test* adalah menentukan metode

yang mana yang terbaik antara metode PLS atau FEM. Uji *Hausman* untuk menentukan metode yang terbaik antara FEM dan REM. Uji *Lagrange Multiplier* untuk menentukan metode mana yang terbaik antar PLS dan REM. Berikut ini akan di tampilkan hasil pengujian tersebut.

Tabel 5.6 Uji Chow Untuk Memilih Antara Model PLS Dengan FEM

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	19.812052	(10,39)	0.0000
Cross-section Chi-square	99.275380	10	0.0000

Sumber : Data diolah, Eviews 12 (2024)

Berdasarkan output Eviews tersebut menunjukkan bahwa baik F test maupun Chi-Square signifikan (Prob.0.0000 dan 0.0000 lebih kecil dibandingkan alfa 0,05 persen), sehingga model ini hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan model PLS. sehingga pengujian berikutnya yaitu dengan membandingkan metode FEM atau REM dengan melakukan uji *Hausman*.

5.2.2 Uji Hausman

Hausman Test (Uji Hausman) dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara FEM dan REM. Untuk mengetahui hasil dari uji Hausman dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.7 Uji Hausman untuk memilih antara model FEM dengan REM

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	25.642311	5	0.0001

Sumber : Data diolah, Eviews 12 (2024)

Berdasarkan output eviews tersebut menunjukkan bahwa nilai statistic Chi-Square memiliki Probabilitas lebih kecil dibandingkan alfa 0,05 persen ($0,0001 < 0,05$) sehingga hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan dengan model REM. Selanjutnya pengujian uji *Lagrange Multiplier* untuk menentukan model yang terbaik antara PLS dan REM.

5.2.4 Hasil Pengujian Estimasi Model FEM

Hasil estimasi persamaan data panel tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8 Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: TPAK? Method: Pooled Least Squares Date: 12/28/24 Time: 06:53 Sample: 1 5 Included observations: 5 Cross-sections included: 11 Total pool (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	145.7668	93.00342	1.567327	0.1249
IPM?	-2.268609	1.903081	1.192071	0.2403
PE?	-0.210821	0.212332	-0.992885	0.0327
PP?	0.081816	0.058669	1.394535	0.1710
KP?	-0.113567	0.223352	-0.508467	0.0313
Fixed Effects (Cross)				
BATANG_HARI--C	-2.223834			
BUNGO--C	-15.13711			
KERINCI--C	9.689502			
KOTA_JAMBI--C	5.313171			
KOTA_SUNGAI_PENUH--C	11.96734			
MERANGIN--C	-0.209830			
MUARO_JAMBI--C	-3.157506			
SAROLANGUN--C	-10.37931			
TANJUNG_JABUNG_BARAT--C	3.554335			
TANJUNG_JABUNG_TIMUR--C	2.237376			
TEBO--C	-1.654134			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.800023	Mean dependent var		50.36255

Adjusted R-squared	0.730031	S.D. dependent var	6.245770
S.E. of regression	3.245209	Akaike info criterion	5.419238
Sum squared resid	421.2553	Schwarz criterion	5.966692
Log likelihood	-134.0290	Hannan-Quinn criter.	5.630943
F-statistic	11.43022	Durbin-Watson stat	2.410461
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah, Eviews 12 (2024)

5.2.5 Uji Hipotesis

5.2.5.1 Uji F Statistik

Dapat dilihat berdasarkan tabel 5.10 diatas diketahui bahwa nilai Prob (F Statistik) $0,0000 > 0,05$, maka berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang artinya uji secara bersama-sama menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

5.2.5.2 Uji R^2

Dapat dilihat pada tabel 5.10 bahwa nilai R-Squared adalah sebesar 80.00 artinya bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan dapat dijelaskan oleh variabel bebas pada tingkat korelasinya sebesar 80.00 persen. Sementara sisanya sebesar 20 persen dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

5.2.5.3 Uji t Statistik

Untuk menguji signifikansi pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) wanita pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi secara parsial maka digunakan uji t statistic. Uji t statistic berguna untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel Independen terhadap variabel dependen secara parsial. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan probabilitas 0,05 persen digunakan alat uji t statistic yang dapat di lihat di tabel berikut ini :

Berrdasarkan tabel 5.10 dapat diterangkan hasil uji t statistik sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa nilai Prob Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,2403 karena $\text{Prob} > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan yang berarti variabel tersebut tidak bermakna.
2. Diketahui bahwa nilai Prob Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,0327 karena $\text{Probability} < 0,05$ persen, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hal ini tidak sependapat dengan penelitian Savitasari (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat psrtisipasi angkatan kerja perempuan. Dijelaskan bahwa tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam kegiatan ekonomi disebabkan oleh kesadaran terhadap perlunya berpartisipasi dalam pembangunan, adanya kemauan untuk mandiri dalam bidang ekonomi, adanya kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga, dan luasnya kesempatan kerja bagi perempuan. Dengan demikian tinggi rendahnya TPAK perempuan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dalam bidang ekonomi. Sehingga, pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak dapat mempengaruhi TPAK Perempuan. Berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi jambi disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat berperan dalam menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
3. Diketahui bahwa nilai Prob Pengeluaran Perkapita sebesar 0,1710 $> 0,05$ persen. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita berpengaruh tidak signifikan yang berarti variabel tersebut tidak bermakna.
4. Diketahui nilai Prob Gini Ratio sebesar 0,0313 karena $\text{Prob} < 0,05$ persen. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hasil ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruri, 2016 dimana Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan adanya peningkatan jumlah TPAK yang meningkatkan ketimpangan dengan tidak signifikan. Berpengaruhnya Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi disebabkan karena tingginya TPAK dan PDRB perkapita di Provinsi Jambi yang menyebabkan kesejahteraan antar masyarakat semakin tinggi dan juga pembangunan pun tidak terhambat dan menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin rendah.

5.2.6 Estimasi Model FEM

5.2.6.1 Estimasi Koefisien Variabel Model FEM

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 5.10 tersebut dapat diketahui penjelasan masing-masing variabel dalam penelitian yaitu indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan gini ratio terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dijelaskan persamaan model sebagai berikut :

$$TPAKP_{it} = 145.766 + 2.268 IPM - 0.210PE + 0.058PP - 0,113GR + e$$

Berdasarkan Persamaan Model diatas dapat dijelaskan hasil estimasi terhadap *fixed Effect* adalah jika terjadi perubahan antara indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan gini ratio baik antar wilayah maupun antar waktu, maka nilai konstanta sebesar 145.766. Hal ini berarti apabila indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan gini ratio maka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar 145.766 persen.

1. Nilai koefisien Indeks Pembangunan manusia sebesar 2.268 Hal ini diartikan jika Indeks Pembangunan manusia meningkat satu persen maka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi meningkat sebesar 2.268 persen.
2. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0,210 Hal ini diartikan jika pertumbuhan ekonomi meningkat satu persen maka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menurun sebesar 0,210

persen.

3. Nilai koefisien pengeluaran perkapita sebesar 0,058 Hal ini diartikan jika pengeluaran perkapita meningkat satu persen maka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi meningkat sebesar 0,058 persen
4. Nilai koefisien Gini Ratio sebesar -0,113. Hal ini diartikan jika tingkat Gini Ratio meningkat satu persen maka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menurun sebesar 0,113persen

5.2.6.2 Estimasi Koefisien Model FEM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Dari hasil estimasi dengan menggunakan *Fixed Effect Model* dapat dijelaskan bahwa masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi memiliki nilai intersep yang berbeda-beda. Individual *Fixed Effect* dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5.11 Estimasi Individual Effect Model FEM

Kabupaten/Kota	Fixed Effect (I)
Kerinci	-2.223.834
Merangin	-1.513.711
Sarolangun	9.689.502
Batang Hari	5.313.171
Muaro Jambi	1.196.734
Tanjung Jabung Timur	-0.209830
Tanjung Jabung Barat	-3.157.506
Tebo	-1.037.931
Bungo	3.554.335
Kota Jambi	2.237.376
Kota Sungai Penuh	-1.654.134

Sumber : Data diolah Eviews 12, (2024)

Berdasarkan estimasi tersebut dapat dilihat bahwa nilai individual *effect* dalam hasil estimasi metode FEM adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Kerinci

Jika terjadi perubahan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita, dan ketimpangan pendapatan baik antar wilayah maupun waktu, maka Kabupaten Kerinci akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun sebesar 2.223834persen.

2. Kabupaten Merangin

Jika terjadi perubahan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita, dan ketimpangan pendapatan baik antar wilayah maupun waktu, maka Kabupaten Merangin akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun sebesar 15.13711 persen.

3. Kabupaten Sarolangun

Jika terjadi perubahan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita, dan ketimpangan pendapatan baik antar wilayah maupun waktu, maka Kabupaten Sarolangun akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat sebesar 9.689502 persen.

4. Kabupaten Batang hari

Jika terjadi perubahan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita, dan ketimpangan pendapatan baik antar wilayah maupun waktu, maka Kabupaten Batang hari akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun sebesar 5.313171 persen.

5. Kabupaten Muaro Jambi

Jika terjadi perubahan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita, dan ketimpangan pendapatan baik antar wilayah maupun waktu, maka Kabupaten Muaro Jambi akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat sebesar 11.96734persen.

6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Jika terjadi perubahan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita, dan ketimpangan pendapatan baik antar wilayah maupun waktu, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun sebesar 0.209830 persen.

7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Jika terjadi perubahan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita, dan ketimpangan pendapatan baik antar wilayah maupun waktu, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun sebesar 5,300990 persen.

8. Kabupaten Tebo

Jika terjadi perubahan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita, dan ketimpangan pendapatan baik antar wilayah maupun waktu, maka Kabupaten Tebo akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun sebesar 10.37931 persen.

9. Kabupaten Bungo

Jika terjadi perubahan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita, dan ketimpangan pendapatan baik antar wilayah maupun waktu,, maka Kabupaten Bungo akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat sebesar 3.554335 persen.

10. Kota Jambi

Jika terjadi perubahan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita, dan ketimpangan pendapatan baik antar wilayah maupun waktu,, maka Kota Jambi akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat sebesar 2.237376 persen.

11. Kota Sungai Penuh

Jika terjadi perubahan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita, dan ketimpangan pendapatan baik antar wilayah maupun waktu,, maka Kota Sungai Penuh akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat sebesar 1.654134 persen.

5.3 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi secara keseluruhan, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran perkapita dan ketimpangan pendapatan selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Sedangkan secara parsial indeks pembangunan manusia dan pengeluaran perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi artinya tinggi dan rendahnya indeks pembangunan manusia, pengeluaran perkapita pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2017 – 2021 tidak berpengaruh signifikan.

Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor terpenting dalam perekonomian, dan dalam hal mengambil suatu kebijakan pemerintah bertindak sebagai kontrol melalui kebijakan – kebijakan yang ditetapkan dengan bertujuan agar roda – roda perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah umum dan mendasar yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia, antara lain terkait dengan peningkatan angkatan kerja maka pemerintah harus menetapkan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja agar membentuk tingkat partisipasi angkatan kerja yang memiliki kemampuan yang mumpuni melalui pelatihan dan kerja yang diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha baik dalam maupun diluar hubungan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah atau lembaga pelatihan kerja swasta dan diselenggarakan ditempat pelatihan atau tempat kerja serta dapat bekerja sama dengan swasta.

Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah hendaknya melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan yang ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas

yang dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi dan efisiensi kegiatan ekonomi guna menuju terwujudnya tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih unggul dalam produktivitas nasional.